



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Sekuritisasi Imigran Ilegal Di Perbatasan Selatan
Amerika Serikat Oleh Presiden Donald Trump:
Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Skripsi

Oleh

Aldelita Putri Balqis Romulia

2017330008

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Sekuritisasi Imigran Ilegal Di Perbatasan Selatan
Amerika Serikat Oleh Presiden Donald Trump:
Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Skripsi

Oleh

Aldelita Putri Balqis Romulia

2017330008

Pembimbing

Adrianus Harsawaskita

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Sarjana Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Aldelita Putri Balqis Romulia
Nomor Pokok : 2017330008
Judul : Sekuritisasi Imigran Ilegal Di Perbatasan Selatan Amerika Serikat Oleh Presiden Donald Trump: Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada, 14 Januari 2021
Dan dinyatakan **Lulus**

Tim Penguji

Ketua Sidang Merangkap anggota

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

: 

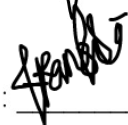
Sekretaris

Adrianus Harsawaskita, S.IP., M.A.

: 

Anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si. (Han)

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldelita Putri Balqis Romulia
NPM : 2017330008
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Sekuritisasi Imigran Ilegal Di Perbatasan Selatan Amerika
Serikat Oleh Presiden Donald Trump : Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku, apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Januari 2021



Aldelita Putri Balqis Romulia

ABSTRAK

Nama : Aldelita Putri Balqis Romulia

NPM : 2017330008

Judul : Sekuritisasi Imigran Ilegal Di Perbatasan Selatan Amerika Serikat Oleh

Presiden Donald Trump : Perubahan Kebijakan Luar Negeri

Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan luar negeri imigrasi yang relatif bebas dan paling terbuka di dunia dengan menerima ratusan ribu imigran setiap tahunnya yang berasal dari regional maupun internasional. Pola pergerakan dari imigran yang masuk ke dalam menyebabkan AS sebagai negara tuan rumah mengalami peningkatan populasi setiap tahun. Hal tersebut mengharuskan setiap pemerintah yang sedang diberikan tanggung jawab memimpin negara menyesuaikan arah kebijakan imigrasinya sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung. Presiden Donald Trump setelah resmi menjadi Presiden AS memiliki fokus untuk menyelesaikan masalah imigran ilegal di perbatasan Selatan dengan pendekatan *America First* dan tindakan sekuritisasi.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian **“Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Presiden Donald Trump Melakukan Sekuritisasi Dalam Mengubah Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat?”** Penulis akan menjawabnya berdasarkan kerangka pemikiran *The Politics Of Foreign Policy Change*. Pendekatan ini mengidentifikasi kondisi internasional dan domestik dengan unsur politik dan ekonomi di dalamnya sebagai faktor yang mendasari perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Didukung oleh peran individu pembuat keputusan dan proses perumusan kebijakan yang dipilih oleh aktor tersebut.

Presiden Donald Trump melakukan tindakan sekuritisasi berdasarkan faktor politik internasional yaitu hadirnya kejahatan transnasional; penipuan identitas, penyelundupan obat terlarang serta tindakan kriminal, dan faktor ekonomi adanya tarif upah rendah imigran yang merusak standar upah minimum pekerja Amerika. Faktor politik domestik yaitu adanya pemenuhan janji kampanye Presiden Trump untuk melindungi warga Amerika dari imigran ilegal. Dan faktor ekonomi yaitu adanya pengambilan lapangan pekerjaan oleh imigran ilegal dengan memalsukan dokumen identitas kerja di suatu perusahaan, sehingga banyak pekerja Amerika kehilangan hak mendapatkan jaminan sosial yang seharusnya dialokasikan untuk mereka.

Kata Kunci: Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Amerika Serikat, Donald Trump, Sekuritisasi.

ABSTRACT

Nama : Aldelita Putri Balqis Romulia

NPM : 2017330008

Judul : *The Securitization of Illegal Immigrants at the Southern Border of the United States by President Donald Trump: Changes in Foreign Policy*

The United States has implemented a foreign policy of immigration that is relatively free and the most open in the world, accepting hundreds of thousands of immigrants annually who come from regionally and internationally. The movement pattern of incoming immigrants causes the US as the host country to experience an increase in population every year. This requires that each government that is being given the responsibility of leading the country adjusts the direction of its immigration policy according to ongoing conditions. President Donald Trump, after officially becoming US President, has focused on solving the problem of illegal immigrants on the South border with an America First approach and securitization measures.

*To answer the research question, "**What are the factors that President Donald Trump should consider securitizing in changing US immigration policy?**" The author will answer based on the framework of *The Politics Of Foreign Policy Change*. This approach identifies international and domestic conditions with political and economic elements in them as factors that underlie changes in a country's foreign policy. Supported by the role of individual decision makers and the policy formulation process chosen by the actor.*

President Donald Trump undertook securitization based on international political factors, namely the presence of transnational crimes; identity fraud, drug trafficking and criminal activity, and the economic factor of low immigrant wage rates that undermine minimum wage standards for American workers. A domestic political factor is the fulfillment of President Trump's campaign promise to protect Americans from illegal immigrants. And the economic factor is the taking of jobs by illegal immigrants by falsifying work identity documents in a company, so that many American workers lose their right to get social security that should be allocated to them.

Keywords: *Changes in the United States Immigration Foreign Policy, Donald Trump, Securitization.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, ridho, karunia dan tuntunan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata-1 program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis apa saja faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Donald Trump melakukan sekuritisasi dalam mengubah kebijakan imigrasi Amerika Serikat dan untuk membantu pembaca memahami dinamika perubahan kebijakan luar negeri imigrasi yang terkait dengan imigran ilegal di perbatasan Selatan.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dalam hal substansi maupun teknis penulisan dikarenakan keterbatasan kemampuan, ilmu, dan sarana yang dimiliki oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu ada penelitian lebih lanjut untuk melengkapi jawaban dari penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis memiliki besar harapan bahwa skripsi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, khususnya untuk yang memiliki ketertarikan lebih pada kajian kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini diselesaikan oleh penulis tentunya karena atas izin Allah S.W.T yang telah mencurahkan nikmat, berkah, sekaligus memberikan pemikiran luar biasa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian akhir ini. Tentunya diberikan kesempatan besar juga untuk bisa menimba ilmu di HI UNPAR adalah hal yang paling penulis syukuri. Tidak lupa salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah memberikan teladan dan adab-adab dalam proses menimba ilmu.

Kepada Papa Adela dan Mama Nani orang tua yang selalu memberikan restu dan doanya di setiap proses menulis penelitian ini. Juga kepada Uni Novita kakak yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini melalui diskusi indah, panjang kami dan kepada Abang Delany, Kak Ira Malika, serta Malviano yang selalu memberikan motivasi bahwa tulisan ini akan selesai. Dukungan materil dan spiritual dari mereka adalah faktor terbesar penulisan ini dapat diselesaikan.

Kepada Mas Adrianus Harsawaskita, atas bimbinganya dan saran-saran terbaiknya yang selalu diberikan kepada penulis hingga tulisan ini dapat disempurnakan dengan baik. Juga atas kesempatan dan kepercayaan yang luar biasa diberikan kepada penulis dalam berdiskusi dan pengambilan keputusan di dalam proses pengerjaannya. Meskipun dilakukan melalui cara yang tidak biasa yaitu virtual namun proses bimbingan bisa diselesaikan dengan sangat baik.

Kepada Mas Nyoman dan Mba Vrames selaku dosen HI Timur Tengah, Rancangan penelitian, Isu Global dan Keamanan Non-Tradisional atas seluruh ilmu pembelajaran yang sangat bermanfaat dan menjadi inspirasi juga dalam penulisan penelitian ini. Serta selaku dosen penguji saat proses sidang skripsi atas pemberian rekomendasi pada tulisan ini sehingga bisa menjadi lebih baik.

Kepada Dinda, Dennis, Annisa dan Kamila “Geng Aja” atas waktunya yang selalu diluangkan untuk penulis ketika ada dalam masa-masa sulit. Dari awal berkenalan yaitu masa SMP sampai sekarang kalian selalu setia memberikan seluruh bantuan yang kalian bisa untuk penulis. Sahabatku terima kasih sudah mau menampung segala keluh kesahku dan penulis meminta maaf jika selalu merepotkan.

Kepada Salwa Hizatullah, Natasha Syifa Rachman, Shella Febriary dan Melinda Puspa Negara adalah sosok sahabat yang walaupun jarang bertemu namun tetap dekat di doa. Atas dukungannya yaitu selalu memberikan semangat, mengingatkan akan Tuhan, dan segala informasi teknis dalam perkuliahan ini.

Kepada JURGA (Jujur Gak Tau) adalah sebuah paguyuban yang penulis kenal di masa perkuliahan di HI UNPAR. Pembentukannya sangat *random* dan memiliki 20 anggota termasuk penulis di dalamnya. Secara tegas penulis bilang bahwa mereka adalah pemberi warna dalam proses perkuliahan di HI UNPAR selama kurang lebih 3.5 tahun walaupun dua semester dilalui melalui proses virtual, namun kehangatan, kebaikan, dan kasih tulus mereka selalu dirasakan oleh Penulis. Dear Gita, Maura, Regina, Reiza, Kimi, Ivan, Rifki, Inez, Floren, Ranti, Rahma, Bella, Sonia, Naomi, Rossy, Bram, Efraim, Mentari dan Gea untuk senang dan kenyang TERIMA KASIH BANYAK.

Terakhir, terima kasih kepada 2017330008 yang sudah terus berjuang bangkit dalam setiap kegagalan, ketidakbisaan dan cobaan-cobaan lainnya. Kamu hebat.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR AKRONIM.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.2.1. Deskripsi Masalah.....	6
1.2.2. Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3. Perumusan Masalah	11
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian	11
1.4. Kajian Pustaka	12
1.5. Kerangka Pemikiran	15
1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
1.6.1. Metode Penelitian	23
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.7 Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II	21
SEKURITISASI IMIGRAN ILEGAL DI PERBATASAN SELATAN AMERIKA SERIKAT OLEH PRESIDEN DONALD TRUMP.....	21
2.1. Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat terhadap Negara Amerika Selatan.....	21
2.2. Proses Sekuritisasi Imigran Ilegal di Perbatasan Selatan Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump	25
2.2.1. Presiden Donald Trump Melakukan Speech Act Mengenai Krisis Perbatasan oleh Imigran Ilegal di Perbatasan Selatan AS.	28
2.2.2. <i>Referent Object</i> dari Imigran Ilegal	34
2.2.3. Tindakan <i>Ordinary Measure</i> Presiden Donald Trump	44

2.2.4. Tindakan <i>extraordinary measure</i> Presiden Donald Trump	52
BAB III.....	53
FAKTOR-FAKTOR PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI IMIGRASI TERKAIT IMIGRAN ILEGAL DI PERBATASAN SELATAN AMERIKA SERIKAT	53
3.1. Faktor Internasional Sumber Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi.....	53
3.1.1 Faktor Politik Internasional.....	53
3.1.2 Faktor Ekonomi Internasional.....	60
3.2. Faktor Domestik Sumber Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi	65
3.2.1 Faktor Politik Domestik.....	65
3.2.2 Faktor Ekonomi Domestik.....	70
BAB IV.....	79
KESIMPULAN	79
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Model Analisis	21
Gambar 1.2 Operasionalisasi Model Analisis.....	22
Gambar 2.1 Jumlah Peningkatan Individu dari negara Segitiga Utara yang melintasi perbatasan Selatan.....	40
Gambar 2.2 Jumlah anak-anak dan keluarga yang ditangkap dari negara Segitiga Utara	41
Gambar 3.1 Laporan lembaga Departement Of Homeland Security Amerika Serikat terkait jumlah imigran ilegal di perbatasan Selatan	55
Gambar 3.2 Jumlah peningkatan imigran ilegal dari tahun ke tahun	56

DAFTAR AKRONIM

AMO	<i>Air Marine Operation</i>
BDSP	<i>Biometric Data Sharing Program</i>
CBP	<i>U.S Customs and Border Protection</i>
DACA	<i>Deferred Action for Childhood Arrivals</i>
DHS	<i>Departemen Of Homeland Security</i>
DoD	<i>Department Of Defense Security</i>
DOJ	<i>The Department of Justice</i>
DOL	<i>The Department of Labour</i>
EPA	<i>The U.S Environmental Protection Agency</i>
ESTA	<i>Electronic System for Travel Authorization</i>
FDA	<i>The Food and Drug Administration</i>
HIS	<i>Homeland Security Investigations</i>
ICE	<i>Immigration Customs and Enforcement</i>
IER	<i>The Civil Rights Division's Immigrant and Employee Rights Sections</i>

IRCA	<i>Immigration Reform And Control Act</i>
IRS	<i>The Internal Revenue Services</i>
JIATF	<i>Joint Interagency Task Force South</i>
MOU	<i>Memorandum of Understanding</i>
NASA	<i>The National Aeronautics and Space Administration</i>
NGU	<i>National Gang Unit</i>
SUAS	<i>Small Aircraft System</i>
TCJA	<i>Tax Cuts & Jobs Act Of 2017</i>
USACE	<i>The U.S Army Corps of Engineers</i>
USCIS	<i>U.S Citizenship and Immigration Service</i>
VOICE	<i>Victims of Immigration Crime Engagement</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak akhir tahun 1800-an Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan luar negeri imigrasi yang relatif bebas dan paling terbuka di dunia dengan menerima ratusan ribu imigran setiap tahunnya yang berasal dari regional maupun internasional.¹ Undang-Undang imigrasi pun mulai dibentuk oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1875 ketika Kongres mulai mengetahui telah terjadi peningkatan imigran masuk dan berdampak kepada penurunan ekonomi di beberapa daerah.² Ribuan orang berusaha mencari peluang dan perlindungan di AS karena dianggap sebagai negara yang bisa memberikan kesempatan kerja, pendidikan yang baik, dan berbagai peluang ekonomi yang terbatas didapatkan oleh para imigran di negara asalnya.³ Pola pergerakan dari imigran yang masuk ke dalam menyebabkan AS sebagai negara tuan rumah mengalami peningkatan populasi setiap tahun dan durasi waktu tinggal mereka biasanya lebih dari satu tahun.⁴

Jumlah imigran yang menetap di Amerika Serikat berdasarkan data biro sensus AS tahun 2017 memperlihatkan bahwa ada sekitar 45 juta orang.⁵

¹ U.S Citizenship And Immigration Service, *Early American Immigration Policies*, (30 Juli 2020), <https://www.uscis.gov/about-us/our-history/overview-of-ins-history/early-american-immigration-policies>

² Ibid.

³ International Migration in the Americas, *First Report of the Continuous Reporting System on International Migration in the Americas (SICREMI)*, Washington D.C, USA 2, (2011). <https://www.oecd.org/migration/48423814.pdf>

⁴ Ibid, 6-7.

⁵ Jean Batalova, Brittany Blizzard, and Jessica Bolter, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, *Migration Policy Institute*, (14 Februari 2020) <https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united-states>.

Setidaknya berdasarkan jumlah tersebut imigran yang menetap di sana telah membentuk empat belas persen dari populasi penduduk AS.⁶ Sehingga kehidupan pluralisme yang berkembang adalah sebab dari kehadiran imigran yang dari generasi ke generasi telah mewarnai kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di sana. Namun dua pertiga imigran yang ada di sana adalah imigran datang dengan keadaan yang tidak berdokumen lengkap (*illegal immigration*), yang selama lebih dari 10 tahun telah tinggal bersama anak-anaknya di dalam tanah air.⁷ Mobilitas imigran ilegal tersebut marak terjadi di wilayah perbatasan Selatan AS. Kehadiran para imigran di Amerika Serikat merupakan sebuah komitmen dari tindakan pemerintah dalam memberikan akses keselamatan dan perlindungan terkait kondisi kemiskinan, kejahatan serta kekerasan konflik yang terjadi di negara asalnya. Hal tersebut tampaknya tidak memberikan timbal balik yang baik untuk negara penerima imigran, karena tingginya pergerakan imigran ini telah memunculkan permasalahan sosial di dalam masyarakat AS. Permasalahan tersebut adalah terkait dengan perdagangan narkoba, dan berbagai tindakan kekerasan dari beberapa oknum kelompok imigran yang tidak bertanggung jawab.⁸ Hal di atas mendorong pemerintah merespon peristiwa tersebut dengan merumuskan beberapa kebijakan terkait penanganan imigran ilegal.

Pemerintah Amerika Serikat mengambil kendali terhadap para imigran ilegal yang mencoba masuk ke dalam negara dengan cara melakukan pemeriksaan

⁶ Ibid.

⁷ Steven A. Camarota, Karen Zeigler, "Record 44.5 Millions Immigrants in 2017," *Center for Immigration Studies*, (15 September 2018) https://cis.org/sites/default/files/2018-09/camarota-imm-pop-sept-18_1.pdf

⁸ Maxine. X. Seller, "Historical Perspective on American Immigration Policy: Case Studies and Current Implications," *Law and Contemp. Probs* 45. (1982): 137.

melalui Undang-Undang imigrasi tahun 1891 yang berisikan perluasan daftar imigran yang bisa dikecualikan masuk seperti melarang imigran yang memiliki kejahatan moral, dan menderita penyakit yang menular.⁹ Pada tahun 1895 pemerintah AS kembali membuat kebijakan imigrasi dan merupakan puncaknya yang dikenal dengan peristiwa “gelombang besar” masuknya imigran, sehingga menuntut Kongres menerapkan kebijakan baru mengenai sistem kuota.¹⁰ Kebijakan tersebut dibuat untuk membatasi pergerakan imigran yang datang ke AS, dan menetapkan persyaratan terhadap pemberian kewarganegaraan kepada para imigran. Kongres juga di tahun 1924 mulai menciptakan patroli biro imigrasi di perbatasan AS.¹¹ Setiap tahunnya kebijakan terkait imigrasi selalu mengalami perubahan bahkan penggantian, seperti halnya pada tahun 1965 Kongres mengganti sistem penerimaan imigran yang berdasarkan kepada “preferensi” bukan lagi melalui sistem negara asal. Hal tersebut dirancang dengan tujuan supaya imigran yang datang ke AS lebih diselektif lagi dengan berdasarkan preferensi keberadaan keluarga imigran yang ada di dalam dan memiliki keterampilan dalam bidang tertentu.¹²

Kebijakan yang telah dibuat, tampaknya tidak berdampak signifikan kepada tingginya jumlah imigran yang terus berdatangan setiap tahunnya. Kebijakan umum pun dirumuskan lagi untuk mengatur keefektifan penerimaan para imigran.

⁹ U.S Citizenship And Immigration Service, *Origins Of The Federal Immigration Service*, (30 Juli 2020), <https://www.uscis.gov/about-us/our-history/overview-of-ins-history/origins-of-the-federal-immigration-service>

¹⁰ “Immigration Policy of the United States,” *The Congress of the United State; Congressional Budget Office Paper*, (february 2006): 1-2.

¹¹ Ibid, 3-5.

¹² Historical Overview of Immigration Policy, *Center for Immigration Studies*, (diakses 24 Oktober 2020), <https://cis.org/Historical-Overview-Immigration-Policy>.

Kongres mengeluarkan Undang-Undang Reformasi dan Kontrol Imigrasi atau *Immigration Reform And Control Act* (IRCA) tahun 1986 yang memiliki dua tujuan yaitu pertama memperketat batas-batas waktu tinggal para imigran dan kedua membuat penegakan hukum untuk mencegah jumlah imigran ilegal yang lebih besar di masa mendatang.¹³ Namun sampai dengan tahun 2000-an setelah beberapa tahun kebijakan tersebut diimplementasikan kasus imigran yang tinggal melewati batas waktu masih banyak dan pengalokasian sumber daya untuk penegakan hukum masih sedikit.

Kebijakan imigrasi Amerika Serikat kembali menjadi subjek utama di tahun 2001 tepatnya setelah peristiwa serangan 9/11. Sebanyak 20 teroris asing yang terlibat dalam serangan merupakan imigran yang tinggal di AS. Empat dari mereka masuk dengan melanggar persyaratan visa dan statusnya adalah ilegal.¹⁴ Pada tahun 2006 reformasi imigrasi sekali lagi dibahas oleh Kongres dan melahirkan Undang-Undang perlindungan perbatasan anti-terorisme dan pengendalian imigrasi ilegal.¹⁵ Kebijakan ini sengaja difokuskan untuk perbatasan dan pedalaman wilayah AS. Perubahan kebijakan imigran ilegal di AS kembali berubah pada tahun 2010, dimana presiden Obama menerapkan pendekatan kebijakan yang terbuka dan mengedepankan hak para imigran tidak berdokumen. Programnya disebut *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA), yang isinya perlindungan deportasi dan

¹³ Ibid.

¹⁴ Muzaffar Chishti, Claire Bergeron, "Post-9/11 Policies Dramatically Alter the U.S Immigration Landscape," Migration Policy Institute (8 September 11) <https://www.migrationpolicy.org/article/post-911-policies-dramatically-alter-us-immigration-landscape>.

¹⁵ Marc R. Rosenblum, "US Immigration Policy Since 9/11 Understanding The Stalemate over Comprehensive Immigration Reform," *The Regional Migration Study Group*, (2011):4-5.

izin kerja kepada anak-anak imigran asing ilegal. Hal tersebut memperlihatkan kondisi dinamis dari pembentukan kebijakan luar negeri AS terkait imigran ilegal yang hadir dari perbatasan.¹⁶

Perubahan kebijakan luar negeri terkait isu imigran ilegal yang terjadi di AS, pada dasarnya dirumuskan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan publik. Namun dalam praktiknya perubahan yang ada bergantung kepada ide atau pandangan aktor pembuat kebijakan yang ingin menyelesaikan masalah imigran ilegal dengan pendekatan seperti apa. Pemerintahan AS di era presiden Donald Trump membuat perubahan kebijakan luar negeri imigran ilegal dengan melakukan sekuritisasi, melalui tindakan pembangunan tembok di perbatasan Selatan.¹⁷ Fenomena meningkatnya jumlah imigran ilegal yang masuk ke dalam tanah air menjadi fokus Presiden Trump sejak masa kampanye sampai proses pelantikannya. Arah kebijakan luar negerinya ini adalah mendorong percepatan penyelesaian ancaman serius dari para imigran. Presiden melihat kurangnya perhatian pada pergerakan imigran yang datang di perbatasan Selatan AS telah menimbulkan situasi darurat yang mengancam keamanan manusia dan krisis keamanan perbatasan. Sehingga hal tersebut mendorongnya untuk mengambil langkah konkret yaitu dengan membangun tembok perbatasan antara Amerika Serikat dengan negara perbatasan Amerika Selatan.

¹⁶ U.S Citizenship and immigration Services, *2014 Executive Actions on Immigration*, (15 April 2015) <https://www.uscis.gov/archive/2014-executive-actions-on-immigration>.

¹⁷ White House Government, *Remarks of President Donald J. Trump- As Prepared For Delivery The Inaugural Address*, (January 20, 2017). <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/>

1.2. Identifikasi Masalah

1.2.1. Deskripsi Masalah

Perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait isu imigran ilegal dari perbatasan Selatan resmi dilakukan oleh Presiden Donald Trump dengan cara sekritisasi. Permasalahan imigran ilegal yang selalu menjadi subjek utama dalam kebijakan luar negeri AS dirumuskan melalui tindakan yang tidak biasa. Presiden Trump resmi mendeklarasikan situasi darurat di perbatasan Selatan AS, dimana sebelumnya telah ditandatangani sebuah dokumen rancangan kebijakan luar negeri terkait imigran untuk tujuan pembangunan tembok perbatasan.¹⁸ Proses untuk merealisasikan hal tersebut melewati serangkaian kejadian panjang di internal pemerintah dan berujung pada penandatanganan *Executive Order* yaitu terkait keamanan perbatasan dan evaluasi pada anggota jajaran keimigrasian dan akhirnya berlanjut pada pendeklarasian *National Emergency Act* adalah sebuah undang-undang khusus milik presiden untuk merespon isu darurat terkait imigran di perbatasan.¹⁹ Keputusan tersebut merupakan sebuah upaya dan perjuangan keras presiden Trump untuk mendapatkan persetujuan pemberian dana dari Kongres AS supaya bisa segera memberikan izin untuk melakukan konstruksi pembangunan di perbatasan.²⁰

Pidato yang dilakukan oleh presiden menyatakan bahwa tindakan keadaan darurat nasional yang diaktifkan ini adalah terkait keamanan warga negara dan

¹⁸ Jacob Pramuk and Christina Wilkie, "Trump Declares National Emergency to Build Border Wall, Setting Up Massive Legal Fight," *CNBC*, February 15, 2019. <https://www.cnn.com/2019/02/15/trump-national-emergency-declaration-border-wall-spending-bill.html>.

¹⁹ U.S Department Of Homeland Security, "Fact Sheet: Executive Order: Border Security And Immigration Enforcement Improvement," *Official Of The Press Secretary*, (February 21, 2017).

²⁰ *Ibid.*

tanah air AS yang merasa terancam oleh ancaman yang datang dari wilayah “perbatasan” dan dilihat juga semakin mengalami kondisi mengkhawatirkan, dengan mendasarkan kepada alasan tersebut presiden percaya melalui instrumen pembangunan tembok perbatasan akan mengurangi aliran masuk imigran ilegal yang datang dari negara-negara Amerika Selatan.²¹ Asumsi yang diberikan oleh presiden adalah terkait pembangunan tembok pembatas ini dinilai merupakan cara yang efektif untuk menutup masuknya jalur para penjahat, anggota geng, penjualan narkoba, dan penyelundupan anak-anak dari negara-negara Amerika Selatan.²²

Fakta yang sering dilupakan oleh negara penerima imigran adalah dampak yang terjadi kepada hak keamanan warga negaranya sendiri. Di bawah presiden Trump pergerakan imigran ilegal dilihat sangat mempengaruhi kehidupan penduduk AS, dari mulai mengambil lapangan pekerjaan, menurunkan tarif upah dari pekerja asli Amerika, mengganggu keselamatan publik, dan penipuan identitas yang berhasil mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah namun seharusnya bisa didapatkan oleh keluarga AS yang miskin dan sangat membutuhkan.²³ Kebutuhan pemerintah AS untuk melakukan pembangunan tembok perbatasan terkait pergerakan imigran adalah karena negara berusaha bertanggung jawab kepada masyarakat atas pemenuhan hak-hak dasarnya yaitu menyangkut keamanan, kebebasan dan kemakmuran di dalam tanah airnya.²⁴

²¹ Johan Davis, “Walls Work,” *U.S Customs and Border Protection*, diakses pada 15 Februari 2020, <https://www.cbp.gov/frontline/border-security>.

²² White House Government, *Remarks by President Trump on the Illegal Immigration Crisis and Border Security*, November 1, 2018) <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-illegal-immigration-crisis-border-security/>.

²³ Ibid.

²⁴ U.S Department Of Homeland Security, *Stopping Illegal Immigration and Security the Border*, (diakses pada 16 Maret 2020). <https://www.dhs.gov/stopping-illegal-immigration-and-securing-border>.

Perubahan kebijakan imigran dengan instrumen pembangunan tembok perbatasan dilakukan presiden Trump dengan tujuan ingin memastikan bisa terciptanya sebuah kondisi yang aman di sana. Terdapat dua fokus utama dari pembangunan tembok tersebut yaitu pertama tentang keamanan yang berlandaskan pada sistem imigrasi yang direformasi dari segi fungsi, operasional dan strukturnya dengan cara memperkuat pembangunan infrastruktur keamanan, dan kedua ingin menciptakan keadilan dengan cara melindungi program pemberian upah kepada warga negara dan memberikan prioritas dalam pemberian lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri.²⁵

Isu imigran ilegal yang datang dari perbatasan sebenarnya bukan merupakan masalah yang baru di domestik AS, walaupun beberapa Presiden telah mencoba menyelesaikan hal tersebut nyatanya peningkatan akan imigran ilegal situasinya semakin memburuk.²⁶ Ketidakmampuan dan kelonggaran peraturan dalam kebijakan luar negeri sebelumnya dinilai memberikan celah pada peningkatan penyelundupan manusia dan hal kejahatan lainnya di sepanjang perbatasan Selatan Amerika.²⁷ Setiap bulanya AS menerima imigran sebanyak 1.500 sampai 2.000 orang yang melakukan pergerakan dan melintasi perbatasan secara ilegal, bahkan pada bulan februari 2019 jumlahnya mencapai 76.000.²⁸ Imigran ilegal yang datang

²⁵ White House Government, *President Donald J. Trump Is Taking Action to Protect Our Social Safety Net and Promote Self-Sufficiency for Non-Citizens*, (May 23, 2019) <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-taking-action-protect-social-safety-net-promote-self-sufficiency-non-citizens/>.

²⁶ White House Government, *President Trump's Bold Immigration Plan for the 21st Century*, (May 21, 2019) <https://www.whitehouse.gov/articles/president-trumps-bold-immigration-plan-21st-century/>.

²⁷ Ibid.

²⁸ U.S Department Of Homeland Security, *Humanitarian and Security Crisis at Southern Border Reaches 'Breaking Point'*, (March 6, 2019) <https://www.dhs.gov/news/2019/03/06/humanitarian-and-security-crisis-southern-border-reaches-breaking-point>.

adalah dengan kategori keluarga dengan resiko tereksplorasi artinya datang dengan dokumen yang tidak lengkap, penyelundupan manusia, imigran tanpa keterampilan, kelompok geng, dan aktor lainnya yang mencoba mencari keuntungan di dalam negeri AS dengan jalan melanggar hukum.²⁹

Patroli perbatasan yang dilakukan oleh anggota keamanan dalam negeri AS menyatakan bahwa dalam beberapa tahun ini bangsa AS telah mengalami lonjakan keluarga asing ilegal yang datang ke dalam negeri dari perbatasan, gelombang kelompok imigran yang masuk diperkirakan mencapai 54%.³⁰ Dua tahun terakhir catatan kriminal yang dilakukan oleh imigran ilegal di dalam negeri AS melalui masuknya kelompok geng ilegal diperkirakan sebanyak 10.000 orang, kejahatan seks, pembunuhan 4.000 orang, kematian warga AS yang overdosis akibat obat-obatan terlarang sebanyak 300 orang setiap minggunya, dan perdagangan manusia, anak mencapai 20.000 orang.³¹ Hal tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat AS sedang mengalami krisis keamanan dan kemanusiaan yang disebabkan oleh tindakan kejahatan transnasional imigran ilegal di perbatasan sehingga membutuhkan tindakan tegas dan luar biasa untuk menyelamatkan keselamatan dan keamanan warganya, yang berusaha diimplementasikan oleh presiden Donald Trump dengan cara melakukan sekuritisasi dalam rangka perubahan kebijakan luar negeri imigrasi AS.

²⁹ Ibid.

³⁰ Gordon H. Hanson, *The Economics and Policy of Illegal Immigration in the United States* (University of California-San Diego and National Bureau of Economic Research & Migration Policy Institute, 2009), 5-6.

³¹ U.S Department Of Homeland Security, *DHS Secretary Nielsen's Remarks On The Illegal Immigration Crisis*, (June 18, 2018) <https://www.dhs.gov/news/2018/06/18/dhs-secretary-nielsens-remarks-illegal-immigration-crisis>.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi bahasan masalah menurut fokus analisis dan waktu. Analisis yang dikaji oleh penulis dalam penelitian adalah terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat imigrasi diubah oleh Presiden Donald Trump. Berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini penyebab perubahan kebijakan luar negeri terjadi karena adanya faktor internasional dan domestik yang memiliki dua unsur yaitu politik dan ekonomi di dalamnya. Faktor internasional dalam segi politik membahas mengenai kehadiran kejahatan transnasional yang dibawa oleh imigran ilegal yang mengancam keamanan warga Amerika, segi ekonominya membahas mengenai adanya penurunan tarif upah dari pekerja Amerika karena imigran yang bekerja di dalam negeri tidak memiliki keterampilan. Faktor domestik yaitu dari segi politiknya membahas mengenai pemenuhan janji kampanye Presiden Donald Trump untuk membangun tembok di perbatasan Selatan sebagai upaya mencegah masuknya imigran ilegal dan dari segi ekonominya membahas mengenai adanya pengambilan lapangan pekerjaan oleh para imigran ilegal dari pekerja Amerika sehingga bantuan sosial untuk warga Amerika yang membutuhkan diambil oleh imigran yang memalsukan identitasnya.

Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2016 dimana Presiden Donald Trump sebagai individu pembuat kebijakan telah melakukan kampanye untuk perubahan kebijakan imigrasi sampai tahun 2020 karena Presiden Donald Trump telah mencapai beberapa perubahan kebijakan imigrasinya yaitu salah satunya terkait keamanan berbasis infrastruktur pembangunan tembok di sepanjang perbatasan Selatan.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka pertanyaan dari rumusan masalah yang akan dijawab oleh penulis dalam penelitian ini adalah: **“Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Presiden Donald Trump Melakukan Sekuritisasi Dalam Mengubah Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat?”**.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan seorang individu pengambil keputusan melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Untuk memahami faktor tersebut penelitian ini akan merujuk kepada teori yang penulis gunakan yaitu dengan membagi faktor menjadi dua kategori internasional dan domestik dengan dua unsur di dalamnya yaitu politik dan ekonomi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dasar pertimbangan Presiden Donald Trump melakukan sekuritisasi untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Amerika Serikat.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan baru untuk penulis selaku mahasiswa hubungan internasional terkait faktor-faktor apa saja yang membuat seorang pengambil keputusan yaitu Presiden Donald Trump melakukan sekuritisasi dalam rangka melakukan perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Amerika Serikat di perbatasan Selatan. Dan besar harapan penulis

penelitian ini bisa mampu menjadi informasi serta referensi untuk pihak-pihak tertentu yang tertarik untuk mengkaji penelitian sejenis atau lanjutan.

1.4. Kajian Pustaka

Untuk mendukung analisis yang komprehensif dan sesuai dengan kaidah yang ada, penulis akan mengkaji berdasarkan kepada beberapa literatur yaitu berupa data artikel, laporan, dan penelitian sejenis yang mampu memberikan pemahaman dengan pandangan yang baru. Serta dapat memberikan fondasi untuk melihat faktor-faktor apa yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Donald Trump melakukan sekuritisasi dalam rangka perubahan kebijakan luar negeri imigran ilegal di perbatasan Selatan Amerika Serikat yang dinilai mengancam keamanan dan kesejahteraan warga Amerika.

Artikel jurnal pertama berjudul *Immigration and The Politics of Security* karya Roxanne Lynn Doty yang menjelaskan bahwa kemunculan pergerakan suatu masyarakat atau individu yang melintasi batas negara dalam arena pembuatan kebijakan tampaknya telah berkembang menjadi isu yang serius. Aktivitas dan pergerakan mereka disebut sebagai imigrasi dan dianggap bisa memunculkan masalah keamanan, konsensus yang muncul yaitu adanya seruan untuk memikirkan kembali konsep keamanan di perbatasan negara untuk nantinya dirumuskan ke dalam suatu kebijakan. Suatu negara dengan tingkat imigrasi yang tinggi dianggap memiliki potensi ancaman kepada keamanan dan kesejahteraan. Masalah yang dibawa oleh para imigran ini biasanya mengacu kepada bidang lingkungan, sosial, ekonomi, dan demografis. Artikel ini juga menekankan suatu negara untuk menerapkan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut dengan

melihat kepada pemahaman politik yang diterapkan oleh pemimpin suatu negara. Implikasi keamanan terhadap imigrasi adalah terkait tindakan radikal seperti tindakan-tindakan kriminal yang mengancam keamanan nasional suatu negara. Pertimbangan negara dalam merumuskan kebijakan imigrasi yang tepat dapat dilihat sebagai suatu tindakan strategis pemerintah dalam memberikan pemahaman baru terkait cara bertanggung jawab pemerintah melindungi keamanan negaranya yaitu dengan langkah pembuatan kebijakan luar negeri.

Artikel kedua sejalan dengan pemaparan artikel sebelumnya, yang berjudul *Border Security: Immigration Enforcement Between Ports of Entry* karya Marc R. Rosenblum yang menjelaskan bahwa penegakan keamanan perbatasan adalah sebuah dasar hukum dari *Departemen Of Homeland Security* (DHS) Amerika Serikat dalam mengontrol arus migrasi ilegal yang datang. Jumlah sumber daya yang dikerahkan merupakan bentuk implementasi dari agenda kongres AS sejak tahun 1970-an ketika imigrasi ilegal datang ke AS dan terdaftar telah menimbulkan masalah nasional yang serius, ditambah lagi fokus perhatiannya setelah adanya serangan terorisme tahun 2001. Kebijakan yang ditetapkan adalah penegakan dengan konsekuensi, yaitu mengkaji para imigran yang memiliki catatan kriminal yaitu tidak berdokumen resmi dan memberikan sanksi. Peningkatan pada penegakan keamanan perbatasan ini ternyata memberikan kontribusi pada jumlah penurunan imigran ilegal secara signifikan di tahun 2000-an. Faktor lainnya yang terkena dampak dari hal di atas adalah bidang ekonomi yaitu terjadi penurunan pada permintaan tenaga kerja para imigran. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan peningkatan keamanan perbatasan mampu memberikan manfaat konkret

kepada keamanan dan sosial dalam negeri dari arus imigran ilegal yang datang ke AS, namun di sisi lain seiring dengan kondisi dunia yang modern yang semakin terbuka dan tanpa batas, dimana tindakan kejahatan pun bisa bermacam-macam di sini pemerintah harus lebih memfokuskan lagi standar strateginya terkait pengalokasian sumber daya supaya tujuan keamanannya menjadi lebih sukses, jelas dan terarah.

Artikel jurnal ketiga berbeda dengan dua kajian sebelumnya berjudul *Migration and Citizen Rights: The Mexican Case* karya Cristina Escobar menjelaskan bahwa peristiwa globalisasi telah menyebabkan transformasi pada imigran-imigran di seluruh dunia khususnya di Amerika Serikat, mengenai status kewarganegaraan. Pergerakan yang mereka lakukan pada kenyataannya sering mendapatkan penolakan dari negara penerima (AS), mereka enggan untuk memberikan hak-hak kepada para imigran yang pada dasarnya telah menjadi bagian mereka sendiri. Hak sipil dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi imigran Amerika Latin ini kerap terabaikan oleh pemerintah AS. Hadirnya hukum internasional sebagai payung untuk melindungi hak-hak imigran di negara tuan rumah tampaknya sulit untuk diimplementasikan. Pada dasarnya hak yang diberikan kepada imigran tersebut tidak akan membuat negara penerima kehilangan kedaulatan dan independensinya, bahkan bisa menjadi bentuk kontribusi negara untuk melindungi hak asasi manusia yang merupakan warga negara asing yang berada di luar negeri. Tanpa ragu pemerintah Amerika Serikat memberlakukan kebijakan ketat kepada imigran Meksiko pada akses-akses sosial dan lapangan pekerjaan yang akhirnya menimbulkan kesenjangan di kehidupannya.

Berdasarkan pada tiga kajian literatur yang penulis gunakan di atas, ditemukan bahwa hasil kajian tersebut memiliki respon yang berbeda-beda. Cara analisis tiga kajian literatur ini terhadap kehadiran imigran ilegal dari perbatasan Selatan Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Jurnal pertama dan kedua menjelaskan tentang penerapan kebijakan migrasi yang tepat adalah instrumen untuk melindungi keamanan nasional suatu negara. Dalam jurnal kedua pemerintah AS berusaha menerapkan kebijakan imigrasi dengan cara meningkatkan keamanan perbatasan, untuk menekan hadirnya imigran ilegal yang mengancam keamanan masyarakat melalui berbagai tindak kriminalnya. Sedangkan jurnal ketiga menjelaskan tentang penerapan kebijakan imigrasi AS kepada para imigran ilegal yang datang dari perbatasan Selatan adalah cenderung mengabaikan hak asasi manusianya karena secara tidak langsung AS telah diduga melakukan penolakan besar kepada kehadiran para imigran tersebut.

Melihat adanya perbedaan pandangan dari tiga kajian literatur tersebut maka penelitian yang penulis lakukan akan berkontribusi pada artikel jurnal pertama dan kedua, dimana penulis ingin menambahkan argumentasi terkait cara pemerintah Amerika Serikat menangani kasus imigran legal. Dan pembedanya adalah penulis menekankan kepada adanya faktor-faktor tertentu yang mendasari Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan sekuritisasi dalam rangka perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri dari suatu negara bisa

mengalami perubahan melalui sebuah proses pengambilan keputusan dengan berdasarkan kepada salah satu pendekatan hubungan internasional yaitu *The Politics Of Foreign Policy Change* atau perubahan kebijakan karya Jakob Gustavsson. Aspek dinamis dari politik internasional dan kebijakan luar negeri jarang mendapat perhatian dalam literatur ilmiah hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Analisis yang ada dibuat cenderung berfokus pada stabilitas daripada transisi dari satu keadaan ke keadaan lain. Pada hakikatnya kebijakan luar negeri merupakan aktivitas resmi yang dilakukan oleh aktor independen biasanya negara dalam menjalin hubungan internasional.³² Robert Gilpin memberikan fokus lain yaitu kepada konsep perubahan kebijakan dengan menekankan tiga faktor yaitu, pertama perlunya memahami statika sebelum beralih ke dinamika yang lebih rumit, kedua terdapat rasa ketidakpercayaan terhadap kemungkinan untuk melakukan generalisasi perubahan dan ketiga terdapat bias normatif yang mendukung stabilitas.³³ Begitu juga Kalevi Holsti yang berpendapat bahwa perubahan diabaikan karena terlalu difokuskan kepada stabilitas, yaitu kondisi dimana terdapat dua kekuatan besar dalam politik internasional dan kepercayaan yang kuat terhadap kestabilan yang muncul akibat sistem interdependensi.³⁴ Atas dasar itulah Jakob Gustavsson berupaya mengisi kekosongan dalam literatur hubungan internasional dengan mengajukan pendekatan perubahan kebijakan (*policy change*). Menurutnya seorang pengambil keputusan akan bertindak untuk

³² Christopher Hill, "Foreign Policy In The Twenty-First Century," *Second Edition Palgrave Macmillan*, New York (2016):

³³ Jakob Gustavsson, "The Politics Of Foreign Policy Change," *Explaining The Swedish Reorientation On EC Membership*, (1998):2.

³⁴ *Ibid*, 3.

melakukan perubahan kebijakan luar negeri berdasarkan kepada apa yang mereka persepsikan dan aktor tersebut cenderung dianggap paling memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan sehingga akhirnya bisa memicu perubahan kepercayaan di kalangan internal untuk setuju dengan adanya perubahan.

Analisis dalam konsep perubahan kebijakan adalah dengan cara mengidentifikasi suatu keadaan yang dianggap menjadi hambatan dalam kebijakan luar negeri yang bisa menyebabkan “kehancuran” sehingga akhirnya menciptakan celah untuk melakukan perubahan. Hambatan yang ada bisa berasal dari kepentingan pribadi, lembaga, non-aktor dan lain-lain. Tujuan empiris dari penelitian *policy change* adalah menyajikan penjelasan yang masuk akal mengenai perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.³⁵ Perubahan kebijakan luar negeri terjadi berdasarkan tiga kondisi, pertama adanya perubahan dalam kondisi struktural fundamental di masyarakat, kedua adanya perubahan kepemimpinan politik yang strategis dan ketiga munculnya suatu kondisi yang dianggap bisa memiliki pengaruh terhadap adanya perubahan yaitu krisis.³⁶ Definisi dari tiga kondisi tersebut adalah perubahan struktural yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat pada dasarnya dapat menciptakan tekanan untuk suatu perubahan, namun hal tersebut tidak bisa bekerja sendiri melainkan harus didukung oleh agen politik yang biasanya individu dengan orientasi melakukan reformasi dalam kepemimpinannya, dan biasanya pemimpin dapat mengendalikan suatu kondisi atau momentum untuk melahirkan keadaan krisis sehingga bisa memberikan

³⁵ Ibid, 18-19.

³⁶ Ibid, 19

kelancaran dalam proses pembuatan proposal kebijakan yang ingin diubah. Peluang keberhasilan akan meningkat pada saat dihadapkannya keadaan “krisis”, sehingga para pembuat keputusan akan cenderung meningkatkan pengambilan resiko politik. Pendekatan perubahan kebijakan luar negeri ini adalah hasil dari kesadaran pembuat keputusan dalam mendefinisikan situasi yang sedang terjadi dan di dalamnya memiliki banyak faktor untuk mengetahui mengapa suatu negara memilih atau bertindak “seperti itu”.³⁷

Kebijakan luar negeri dipahami sebagai serangkaian tujuan, arahan, atau niat yang dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki posisi atau jabatan resmi yang diarahkan kepada kondisi lingkungan di luar negara bangsa berdaulat. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi target dengan cara-cara yang diinginkan oleh individu pembuat kebijakan. Perubahan sendiri memiliki definisi sebagai tindakan baru dalam situasi tertentu yang tindakanya dikaitkan dengan situasi atau tindakan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut menyiratkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri bisa diubah berdasarkan tujuan baru ataupun tujuan yang tetap sama, hingga pada saat bersamaan terjadi perubahan di seluruh orientasi internasional dengan berdasarkan kepada kebijakan luar negeri barunya.³⁸ Penelitian perubahan kebijakan luar negeri didasarkan kepada cara-cara mengidentifikasi sejumlah sumber individu pembuat keputusan yang bertindak dalam proses pengambilan keputusan yang dapat membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri. Sumber tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor

³⁷ Jakob Gustavsson, “The Politics Of Foreign Policy Change,” *Explaining The Swedish Reorientation On EC Membership*, (1998):20.

³⁸ *Ibid*, 22-23.

internasional dan domestik yang juga memasukan unsur akademis politik dan ekonomi.³⁹

Berdasarkan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab perubahan kebijakan luar negeri di tingkat internasional dalam unsur faktor politik merujuk kepada fenomena politik internasional yang sifatnya agresif dan egosentrik, sehingga setiap negara harus bisa memperjuangkan kepentingan nasional, integritas teritorial, dan kedaulatan negara.⁴⁰ Perjuangan tersebut di dalamnya menekankan pentingnya aspek keamanan nasional. Kejahatan transnasional salah satunya yang dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global karena sifatnya melibatkan banyak negara. Kejahatan transnasional dipahami sebagai aktivitas kriminal yang sistematis oleh kelompok kriminal tertentu. Bentuk tindakannya merujuk kepada pencurian, penipuan, pemalsuan, dan perdagangan obat-obatan ilegal.⁴¹ Faktor ekonominya merujuk kepada globalisasi ekonomi telah menyebabkan reformasi pada kebijakan ekonomi domestik. Hal tersebut berkaitan dengan perjuangan untuk meningkatkan produktivitas pekerja supaya bisa mengarah kepada kenaikan upah pekerja, namun ternyata keberhasilannya bergantung kepada bagaimana institusi domestik merumuskan kebijakan yang memprioritaskan perlindungan kepada hak-hak pekerja.⁴² Analisis terhadap 28 perusahaan industri manufaktur di 117 negara menunjukkan bahwa peningkatan

³⁹ Ibid, 23.

⁴⁰ Bob Sugeng Hadiwinata, "Studi Dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, Dan Reflektifis," *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta (2017):102-103.

⁴¹ Adam Edwards dan Peter Gill, "Transnational Organised Crime: Perspectives On Global Security," *Routledge*, London and New York (2004):13-14.

⁴² Adam Dean, "Power Over Profits: The Political Economy Of Workers And Wages," *Politics & Society* 43, no.3 (2015): 333-360.

upah terjadi apabila hak pekerja dilindungi dengan baik, dimana keterbukaan ekonomi harus tetap memprioritaskan pekerja domestik.⁴³ Di tingkat domestik faktor politiknya merujuk kepada strategi untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih saat pemilu, partai politik dan aktor penting di kalangan masyarakat dengan tujuan untuk bisa merumuskan kebijakan luar negeri tertentu dengan melalui cara jajak pendapat, hasil pemilihan umum, dan pembentukan koalisi antara beberapa aktor politik utama.⁴⁴ Faktor ekonominya merujuk kepada perkembangan ekonomi secara umum yang dapat diamati oleh indikator statistik seperti tingkat pengangguran.⁴⁵ Para pekerja yang kehilangan pekerjaannya tidak sepenuhnya bersumber dari kesalahan mereka, melainkan terdapat peran bagaimana pemerintah suatu negara menerapkan kebijakan ekonominya.⁴⁶ Faktor-faktor dalam perubahan kebijakan luar negeri yang telah disebutkan di atas bisa berhasil pada saat aktor individu pembuat keputusan memperhitungkannya dan mempersepsikan sehingga bisa sampai pada tahap pengimplementasian.

Pada prinsipnya dalam pendekatan ini berfokus kepada individu pengambil keputusan dimana keputusan yang diambilnya dipengaruhi oleh faktor internasional dan politik yang memiliki unsur politik dan ekonomi di dalamnya. Faktor tersebut akhirnya membuat individu pembuat keputusan terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan hingga melahirkan empat tingkatan perubahan kebijakan luar negeri;

⁴³ Ibid, 352.

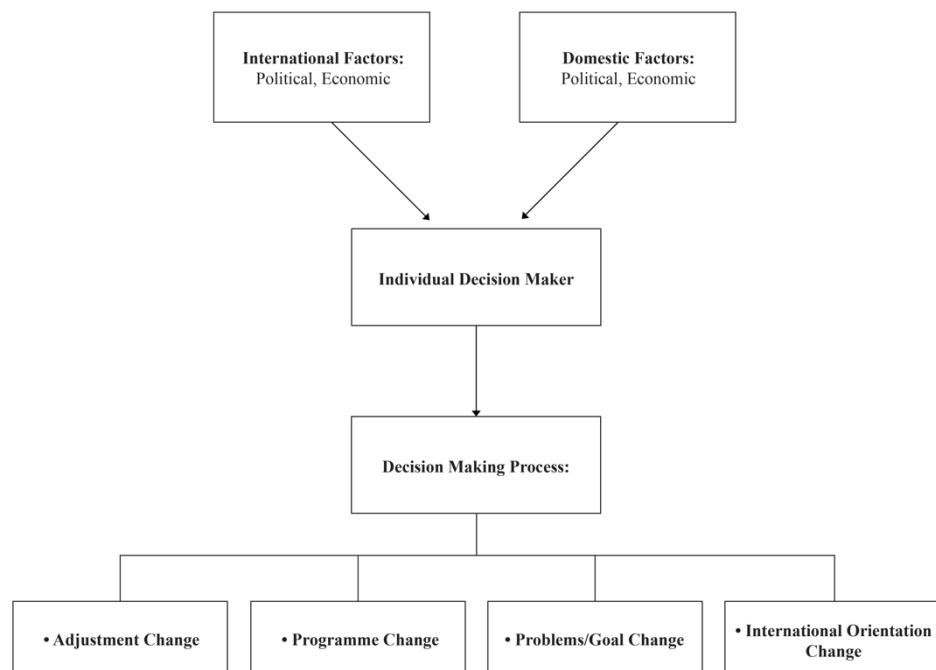
⁴⁴ Jakob Gustavsson, "The Politics Of Foreign Policy Change," *Explaining The Swedish Reorientation On EC Membership*, (1998):23.

⁴⁵ Walter Nicholson dan Karen Needels, "Unemployment Insurance: Strengthening The Relationship Between Theory and Policy," *Journal Of Economic Perspectives* 20, no 3, (2006):47-70.

⁴⁶ Ibid, 66.

perubahan penyesuaian, perubahan program, perubahan masalah atau tujuan dan perubahan orientasi internasional. Dinamika pendekatan ini diilustrasikan oleh gambar berikut. Tiga langkah (1) faktor internasional dan domestik, (2) aktor pengambil keputusan, dan (3) proses pengambilan keputusan.⁴⁷ Berikut akan ditampilkan Ilustrasi gambar untuk mengetahui bagaimana teori di operasionalisasikan, untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Donald Trump melakukan sekuritisasi dalam rangka perubahan kebijakan luar negeri imigrasi Amerika Serikat di perbatasan Selatan.

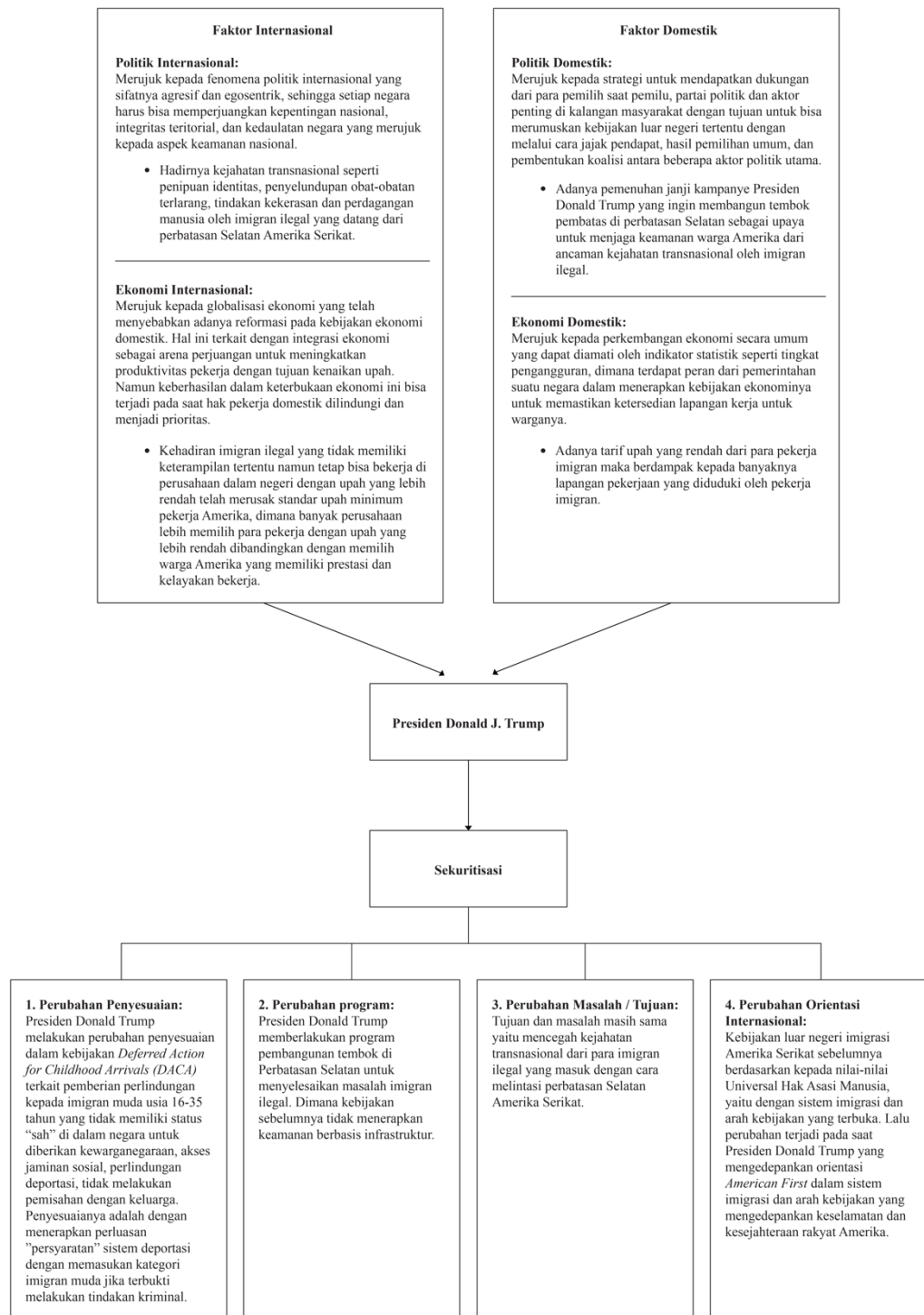
Gambar 1.1 Model Analisis



Sumber: Diolah oleh penulis.

⁴⁷ Ibid, 24-25.

Gambar 1.2 Operasionalisasi Model Analisis



Sumber: Diolah oleh Penulis

Perubahan dalam kebijakan luar negeri dapat terjadi karena dipicu oleh dinamika konsekuensi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Hal tersebut membentuk kondisi dan peluang di domestik negara untuk menuju kepada proses reformasi dalam kebijakan luar negeri. Perubahan kebijakan bisa tercapai ketika waktunya disesuaikan secara tepat dan strategi politik dimanfaatkan dengan baik sehingga ide yang ingin diubah oleh aktor pengambil keputusan sampai menjadi agenda politik dan berakhir kepada sikap masyarakat yang meyakini bahwa hal tersebut adalah solusi ideal untuk masalah yang dihadapi. Selain itu momen krisis juga menjadi instrumen penting untuk melakukan tindakan politik luar biasa, karena krisis berkaitan dengan rasa takut dan keadaan darurat.⁴⁸

1.6. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yang menekankan pada pentingnya pemahaman secara deskriptif atau narasi mengenai konteks sosial politik dan budaya yang berinteraksi secara langsung dengan perilaku manusia.⁴⁹ Fenomena sosial yang dikaji dalam metode kualitatif adalah dengan cara mencari sebab akibat dari variabel independen dan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Pengumpulan data metode kualitatif adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kasus, dan studi pustaka. Metode kualitatif

⁴⁸ Ibid, 26-26.

⁴⁹ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014).

menghasilkan fokus pengamatan yang mendalam, sehingga dapat berdampak kepada hasil kajian yang komprehensif.⁵⁰

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber relevan diantaranya adalah yang membahas mengenai teori Hubungan Internasional khususnya konsep perubahan kebijakan luar negeri. Selain itu data berbentuk fisik dan digital yang diperbolehkan dan terpercaya seperti, buku, artikel, jurnal, artikel berita, laporan serta publikasi organisasi internasional, lembaga riset, dan dokumen resmi negara yang terkait dengan penelitian. Penulis akan mengutamakan penggunaan data yang dipublikasi secara resmi oleh suatu institusi terkait demi tercapainya data yang akurat. Data-data yang telah diperoleh, akan penulis interpretasi dan analisa lebih dalam untuk dapat mencapai suatu kesimpulan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian dimulai dengan **Bab I adalah pendahuluan** yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah yang merupakan dasar dari penelitian ini. Penjelasan dilanjutkan dengan menjabarkan Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Literatur, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan ditutup dengan Sistematika Pembahasan.

⁵⁰ Ibid.

Pada **Bab II** penulis akan membahas **Sekuritisasi Imigran Ilegal Di Perbatasan Selatan Amerika Serikat Oleh Presiden Donald Trump**. Penulis akan menjelaskan kebijakan migrasi Amerika Serikat terhadap negara Amerika Selatan dan akan menjelaskan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump mulai dari melakukan *speech act* dalam rangka pemberitahuan adanya krisis keamanan di perbatasan, warga Amerika sebagai objek utama yang terancam dari aktivitas kriminal imigran ilegal, lalu tindakan *ordinary* dan *extraordinary measure*.

Pada **Bab III** penulis akan melanjutkan pembahasan terkait **Faktor-Faktor Perubahan Kebijakan Luar Negeri Imigrasi Terkait Imigran Ilegal Dari Perbatasan Selatan Amerika Serikat**. Penulis akan menganalisis faktor tersebut berdasarkan dengan kerangka pemikiran yang digunakan yaitu *The Politics Of Foreign Policy Change* karya Jakob Gustavsson. Berdasarkan hal tersebut faktornya terbagi menjadi dua kategori internasional dan domestik yang di dalamnya memiliki unsur politik dan ekonomi.

Pada **Bab IV** penulis akan mengakhiri penelitian ini dengan menjawab pernyataan penelitian yang berdasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan untuk akhirnya dijadikan kesimpulan yang merangkum seluruh proses penelitian.